

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Bassiouni, M. Cherif. *Kejahatan Kemanusiaan: Sejarah, Hukum, dan Politik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017.
- Bedner, A. W., Irianto, S., Otto, J. M., & Wirastri, T. D. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: *Pustaka Larasan*.
- Boli Sabon, Max, Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Universitas Atma Jaya). 2003, hlm. 79.
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, New Dehli:Manas Publication, 2003, hlm 57.
- Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung, hlm.20.
- Erazak Tileubergeno et al., *Defining the Regulations of War in the Hague Convention of 1907*. 2016, hlm. 156.
- Fiona McKay, “Civil Reparation in National Courts for Victims of Human Rights Abuse”, dalam buku *Justice for Crimes against Humanity* yang disusun oleh Mark Lattimer dan Philippe Sands (eds), Portland-Oregon: Hart Publishing, 2003, hlm. 283-284.
- Harahap, A. P. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Perdagangan Hasil Illegal Logging*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan

- Ilmu Sosial, 6(1), 54-61. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Haryomataram, 2009, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.97
- Hasibuan, R. R. A. (2020). Buku Ajar Perekonomian Indonesia.
- Hiariej, Eddy O.S. (2009). Pengantar Hukum Pidana Internasional, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- International Comitte of Red Cross. (1996). Hukum Humaniter International, Jakarta: ICRC.
- Krustiyati, J. M. (2010). *Penanganan Pengungsi di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*. Brilliant Internasional.
- Majda El Muhtaj, Dimensi - dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Edisi 2, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hlm. 35.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1963, Konvensi Djenewa TH. 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Dhiwantara, Bandung, hlm. 5.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Oliver Rambotsham, at.al, 2005, "Conflict Resolution", Second Edition,

Cambridge : Polity Press , 2006 , hlm. 88

Pablo de Greiff, “Justice and Reparations”, dalam buku *The Handbook of Reparations*, yang disusun oleh Pablo De Greiff (eds), New York: Oxford University Press, 2006, hlm. 452.

Puspita, L. (2020). Kajian Filosofi Hukum Internasional Berdasarkan Pemikiran Brian Z.

Ridwan HR. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Romli Atmasasmita , 2000 , Pengantar Hukum Pidana Internasional , Refika Aditama , Jakarta , h.40.

Sujatmoko. Pemulihan (Reparations) Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Argentina Dan Cile, hlm. 79.

Sunyowati, D., & Narwati, E. (2013). Buku Ajar Hukum Laut. Airlangga University Press.

Website

Admin Skripsi Tesis, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”,
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>,

diakses pada 19 Oktober 2022.

[Imunitas Perwakilan Negara Asing dalam Perjanjian Kerja Staf Lokal \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com). diakses pada 14 oktober 2023

Nugraha, Rizki. "Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka yang Dituduh Pelanggar HAM". BBC Indonesia, 18 November 2019. [Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 2022 \(kompas.com\)](#)

<https://www.kompas.com/global/read/2022/09/03/164500070/gotabaya-rajapaksa-akhirnya-kembali-ke-sri-lanka-ini-kronologinya>, diakses pada tanggal 23 November 2023.

<https://www.tribunnews.com/internasional/2022/07/13/profil-gotabaya-rajapaksa-presiden-sri-lanka-yang-kabur-berasal-dari-keluarga-paling-berkuasa>, diakses pada tanggal 23 November 2023.

<https://www.kompas.com/global/read/2022/07/11/170200870/kronologi-pelarian-presiden-sri-lanka-gotabaya-rajapaksa-hingga>, diakses pada tanggal 23 November 2023.

<https://www.dw.com/id/tiba-di-sri-lanka-gotabaya-rajapaksa-terancam-hadapi-pidana/a-63019314>, diakses pada tanggal 23 November 2023.

<https://www.kompas.com/global/read/2022/07/11/170200870/kronologi-pelarian-presiden-sri-lanka-gotabaya-rajapaksa-hingga>, diakses pada tanggal 23 November 2023.

[Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa Akhirnya Mundur | Republika Online](#), diakses pada tanggal 23 November 2023.

<https://www.kompas.com/global/read/2021/08/22/152215670/22-agustus-dalam-sejarah-lahirnya-konvensi-jenewa-pada-1864>, diakses pada tanggal 24 November 2023.

<https://www.presidentsoffice.gov.lk/index.php/the-president/>, diakses pada tanggal 25 November 2023.

<https://www.hrw.org/news/2023/01/17/canada-sanctions-two-sri-lankan-ex-presidents-rights-violations#:~:text=The%20United%20Nations%2C%20the%20media,killi ng%20of%20journalists%20and%20activists>, diakses pada tanggal 25 November 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220811180606-106-833560/didepak-singapura-eks-presiden-sri-lanka-terbang-ke-thailand>, diakses pada 23 November 2023

Jurnal Nasional

Anggren, I., & Mangku, D. (2019). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*.

Daniati, E. P. (2020). Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik. *Locus Delicti*, 88-95.

Daniati, N. P. E. (2020). Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik. *Jurnal Locus Delicti*, 1(2), 88-95.

Dermawan, A., Saputra, E., & Hutagalung, J. E. (2021). Peran masyarakat dalam menaati hukum dan mendukung perkembangan teknologi komputer dalam bisnis digital. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian*

Masyarakat, 2(3), 569-573.

Indratanto, S. P., & Nurainun, K. L. K. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga

Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang. *Samudra*, 2020 Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan Dalam

Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1),

83-97.

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema*

Keadilan, Vol. 7, No. 1 Juni 2020.

Larissa Anindya dan Najamuddin Khairur Rijal, “DEMOKRASI DAN GERAKAN

RAKYAT DI TENGAH KRISIS EKONOMI SRI LANKA”, *Jurnal Ilmu*

Administrasi Publik, Vol. 5, No. 1 Maret 2017, FISIP UM MATARAM,

hlm.6.

M. Cherif Bassiouni, “International Recognition of Victims' Rights”, *Human Rights*

Law Review, 2006, hlm. 203- 279.

Mangku, Sudika dan Dewa Gede. (2013). Kasus Pelanggaran HAM Etnis

Rohingnya : dalam Perspektif ASEAN. *Jurnal Media Komunikasi FIS Vol*

12, No. 2 Agustus 2013 hlm. 27.

Muchtar, F., Buchari, S., & Sh, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Maskapai Penerbangan Air Asia Qz8501 Dalam Hal Terjadi Kecelakaan

Pesawat Terbang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Mumtazinur. (2018). Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia. *Jurnal Dusturiah. VOL.8. NO.2. (Juli -Desember) 2018.* hlm. 59.

O'Connel, D.P.. International Law vol. II. (London: Steven and Son, 1965, hal 40.

Oktariawan, Ketut Agus. (2021) Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 4 Nomor 3 November 2021), hlm. 877.

Panggabean, D., Suhaidi, S., Ediwarman, E., & Leviza, J. (2021, October). Legal Political Analysis of Failure Factors of Extradition Treaty Ratification between Indonesia and Singapore. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia.*

Pramono, B., & Larasati, A. (2022). Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 343-351

Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, “Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2021).

- Putri, Rizki Dwi. "Kekebalan Diplomatik dan Konsuler dalam Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Hukum Internasional* 17, no. 1 (2020): 63-76.
- Rachman, A. M. I., & Hastri, E. D. (2021). Implikasi Prinsip Right of External Self Determination Terhadap Kedaulatan Negara Induk Sebagai Subjek Hukum Internasional. *Jurnal Jendela Hukum*.
- Suastama, I. G. P. N., Budiarta, I. N. P., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2023). Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 7-13.
- Tambunan, R., & Yohanes, R. (2023). Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan Internasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- Trisilya, A. A. N., Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2022). Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Penerima Atas Tindakan Perusakan Gedung Kedutaan Malaysia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, hal 42

Hasil Penelitian

- Sujarwo, Herman. (2017). Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Instrumen Hukum Internasional. *Jurnal*
- Febriyani, Komang Ayu Dita. (2021) Pelanggaran Ham Dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingnya di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal*

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Den Haag 1907

Protokol Tambahan 1977

The Rome Statute of the International Criminal Court

Sri Lanka: Penal Code [Sri Lanka], Chapter 19, 1 January 1885

